

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anderson, Patrick. 2011. *Free, Prior, and Informed Consent in REDD+ Principles and Approaches for Policy and Project Development*. The Center of People and Forest. Bangkok.
- Bosko, Rafael Edy. 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Elsam. Jakarta.
- Kusumastuti, Adhi. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. Semarang.
- Rahayu, Derita Prapti. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Thafamedia. Yogyakarta.
- Sidharta. 1997. *Irigasi dan Bangunan Air*. Penerbit Gunadarma. Depok.
- Sudirman. 2021. *Sistem Irigasi dan Bangunan Air*. Penerbit Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W. 2019. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Raja Grafindo. Depok.
- Widjatmoko. 2001. *Irigasi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

B. Dokumen

Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Bahan Diskusi Daerah Irigasi Kewenangan Pusat di BBWS Sumatera VIII (IPDMIP) Daerah Kelingi Tugu Mulyo.

Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Diskusi Draft Laporan Antara Kajian Batas Sempadan Jaringan irigasi (IPDMIP) D.I. Kelingi Tugumulyo Kab. Musi Rawas.

Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Kajian Batas Sempadan Jaringan Irigasi (IPDMIP) D.I. Kelingi Tugumulyo Kab. Musi Rawas Laporan Antara.

Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Kajian Batas Sempadan Jaringan Irigasi (IPDMIP) D.I. Kelingi Tugumulyo Kab. Musi Rawas Laporan Inventarisasi.

C. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas. “Jumlah Penduduk, 2014-2021”. <https://musirawaskab.bps.go.id/indicator/12/57/1/jumlah-penduduk.html>. Diakses pada 24 Agustus 2022.

Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII. “Konflik Air Daerah Irigasi Kelingi Tugu Mulyo Provinsi Sumatera Selatan”. <https://sda.pu.go.id/balai/bbwssumatera8/2018/02/19/konflik-air-daerah-irigasi-kelingi-tugu-mulyo-provinsi-sumatera-selatan/>. Diakses pada 24 Agustus 2022.

D. Jurnal

- Ikbal. 2012. *Prinsip Free and Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat atas Tanah dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6 (3).
- Mahanty, Sango. 2013. *How does 'Free, Prior and Informed Consent' (FPIC) impact social equity? Lessons from mining and forestry and their implications for REDD+*. Land Use Policy. Vol. 35.
- Mukhlis, Muhammad. 2021. *Penentuan Garis Sempadan Sungai dan Irigasi di Wilayah Ibukota Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Profesi Insinyur - JPI. Vol. 2 (1).
- Nidasari, Nisa Istiqomah. 2014. *Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi*. Jurnal Hukum Lingkungan. Vol. 1 (2).
- Sungkawa, Wawa. 2022. *Penegakan Hukum Bangunan Liar di Garis Sempadan Sepanjang Saluran Irigasi Kabupaten Cianjur*. Proceeding Justicia Conference. Vol. 1.
- Widjaya, Joyce Martha. 2013. *Dampak Alih Fungsi Lahan Irigasi Menjadi Permukiman Terhadap Kinerja Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Kawasan Gayungsari Surabaya)*. Jurnal Sumber Daya Air. Vol. 9 (1).

E. Deklarasi

Universal Declaration of Human Rights. 1948.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1112).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869).

G. Skripsi

Thariq Al Fayen, 2021, *Penertiban Pendirian Bangunan di Sepanjang Area
Sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago Kecamatan Pauh Kota
Padang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas.